

**DAKWAH REKONSILIASI PEMERINTAH KABUPATEN
SAMPANG DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR
PENGANUT SUNNI-SYI'AH DI SAMPANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Program Magister Komunikasi Penyiaran Islam



Oleh:

Dwi Putri Robiatul Adawiyah

(F52719230)

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dwi Putri Robiatul Adawiyah

Nim : F52719230

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel
Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 November 2021

Yang Menyatakan



Dwi Putri Robiatul Adawiyah
NIM. F52719230

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Dwi Putri Robiatul Adawiyah dengan judul “Dakwah Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Penyelesaian Konflik Antar Penganut Sunni-Syi’ah di Sampang” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

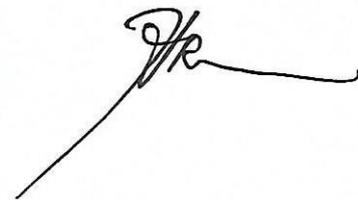
Surabaya, 11 November 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag
NIP. 195706091983031003

Pembimbing II



Dr. Moch. Choirul Arif, S.Ag, M.Fil.I
NIP. 197110171998031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Dwi Putri Robiatul Adawiyah berjudul
 Dakwah Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Penyelesaian Konflik
 Antar Penganut Sunni-Syi'ah di Sampang

Tim Penguji :

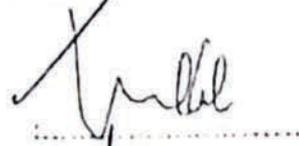
1. Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag. (Ketua/Penguji I)



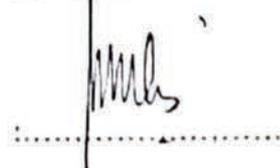
2. Dr. Moch. Choirul Arif, S.Ag., M.Fil.I. (Sekretaris/ Penguji II)



3. Prof. Dr. H. Shonhadji, Dip.IS. (Penguji III)



4. Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag. (Penguji IV)



Surabaya, 28 Desember 2021



Aswadi, M.Ag
 NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Putri Robiatul Adawiyah
NIM : F52719230
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
E-mail address : putrirad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Februari 2022

Penulis

(Dwi Putri Robiatul Adawiyah)

ABSTRAK

Dwi Putri Robiatul Adawiyah, 2021, F52719230. *Dakwah Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Penyelesaian Konflik Antar Penganut Sunni-Syi'ah di Sampang.* Tesis. Magister Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Dakwah Rekonsiliasi, Pemerintah Kabupaten Sampang, Penganut Sunni-Syi'ah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dakwah Pemerintah Kabupaten Sampang dalam rekonsiliasi penganut aliran Syi'ah dan Sunni, serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Sampang dalam melakukan dakwah rekonsiliasi. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori rekonsiliasi dari John Paul Lederach digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dakwah rekonsiliasi Pemerintah dilakukan dengan beberapa tahap a) tabayyun (klarifikasi) yakni mencari tahu permasalahan secara mendalam dari pandangan kedua belah pihak. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sampang menganalisis permasalahan secara perlahan untuk menyusun penyelesaian konflik yang tepat. b) tahkim (mediasi). Pemerintah melakukan mediasi secara bergantian menemui penganut Sunni dan Syi'ah untuk mencari cara menyelesaikan konflik. Selain itu, pemerintah melaksanakan program tanah sistematis lengkap (PTSL) sebagai media untuk menghantarkan kedua belah pihak bertemu dan berinteraksi bersama. c) syura (musyawarah) Pemerintah sebagai mediator berperan sebagai penyambung lidah penganut Sunni dan penganut Syi'ah. Pemerintah melakukan musyawarah dengan penganut Syi'ah dengan menyampaikan hal-hal yang menjadi tuntutan penganut Sunni. Begitupula sebaliknya pemerintah mengadakan musyawarah dengan penganut Sunni mengenai keinginan penganut Syi'ah kembali ke Ahlussunnah. d) ishlah (perdamaian) ditandai dengan kembalinya penganut Syi'ah ke ajaran Ahlussunnah yang pada akhirnya membuka ruang penerimaan masyarakat. 2) Faktor pendukung dakwah rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Sampang berasal dari internal maupun eksternal meliputi, a) kemauan dan kemampuan pemerintah menyelesaikan konflik, b) strategi yang digunakan pemerintah, c) dukungan dari berbagai pihak, d) keterbukaan diri, e) proses pengenalan, f) saling memahami atau tafahum. 3) Faktor penghambat dakwah rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Sampang berasal dari internal maupun eksternal meliputi, a) ketidakpercayaan terhadap pemerintah, b) perbedaan persepsi diantara tim rekonsiliasi, c) egoisme yang tinggi, d) adanya sikap menutup diri, dan e) pemahaman Islam yang masih dangkal dan f) adanya sikap suka bermusuhan.

Nahdlatul Ulama yang menerapkan Ahlussunnah al jamaah atau disebut dengan aliran Sunni merupakan aliran mayoritas yang dianut oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat Sampang yang telah ada sejak dahulu. Terdapat beberapa hal yang menjadi landasan pengikut aliran Sunni, yakni, tata cara beribadah, kepercayaan, perspektif dan hubungannya dengan manusia. Sebagai aliran mayoritas aliran ini memiliki banyak pengikut dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Selain aliran Sunni terdapat juga aliran minoritas, salah satunya yakni aliran Syi'ah. Aliran Syi'ah merupakan aliran baru yang hadir ditengah-tengah masyarakat Sampang. Pada awal perkembangannya, aliran Syi'ah ini disebut sesat oleh para kyai yang ada. Alasan pelabelan sesat pada ajaran Syi'ah ini disebabkan oleh perbedaan madzab, pandangan maupun urusan ubudiyah dengan pengikut aliran Sunni. Beberapa perbedaan yang tampak antara lain, tata cara sholat, yang mana pengikut aliran Syi'ah waktu pelaksanaan sholatnya hanya tiga waktu, ketika sholat tidak bersedekap (menempelkan tangan di dada), dan terdapat pengucapan kalimat syahadat yang berbeda dengan pengikut aliran Sunni. Syahadat dalam ajaran Syi'ah terdapat lanjutan kalimat Ali habibullah dan seterusnya.

Aliran Sunni dan Syi'ah telah lama berseteru dan bersitegang untuk itu berbagai pihak berusaha untuk menyelesaikannya salah satunya pemerintah. Pemerintahan sejak tahun 2012 dimana konflik ini meletus telah melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun berbagai upaya yang dilakukan selalu menemui kegagalan. Tiga periode pemerintahan telah

B. Tabel Progress Rekonsiliasi dari Tahun ke Tahun yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Sampang

No.	Tahun	Tahapan dan Upaya Rekonsiliasi
1.	2012-2013	<p>a. Sejak pecah konflik kedua yakni pada tanggal 26 Agustus 2012, penganut aliran Syi'ah ditempatkan di GOR Wijaya Kusuma Sampang, Pemerintah Kabupaten Sampang menanggung biaya hidup sehari-hari dari para warga.²⁷⁵</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk Tim 5 penyelesaian konflik yang diambil dari tokoh masyarakat, kyai dan ulama beranggotakan 5 orang warga Desa Blu'uran, Kecamatan Karangpenang, Sampang dan 5 orang warga Desa Karanggayam, Omben, Sampang.²⁷⁶</p> <p>c. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Ulama, Mendagri, Dirjen Kesbangpol, Dirjen Bimas Islam Kemenag, dan Gubernur Jawa Timur mengadakan mediasi yang dilakukan di Hotel Shangrila, Surabaya pada tanggal 08 Oktober 2013²⁷⁷. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penganut Syi'ah sebelum kembali ke daerah masing-masing terlebih dahulu dipindahkan di Asrama Haji, Surabaya. Di sana, penganut aliran Syi'ah diwajibkan mengikuti pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh Ulama Madura yang disediakan oleh Kemenag, Jawa Timur. Setelah lulus dari sana selanjutnya mereka dipondokkan di pesantren yang diasuh oleh Ulama Bassra di Madura sambil</p>

²⁷⁵ Tim Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Sampang, "Progress dan Dinamika," Dokumentasi (Sampang, 2020).

²⁷⁶ Eko Purwanto, *Wawancara*, Juni 2021.

²⁷⁷ Desyana Fadhilatin Nafitri, "Peran Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Penyelesaian Hak Warga Negara Pasca Konflik Syiah-Sunni Perspektif Imam Al-Mawardi" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31006/1/15230007.pdf>.

		<p>menunggu pembangunan rumah mereka.</p> <p>d. Pemerintah Kabupaten Sampang dan Ulama, Prof A'la Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai ketua Tim Rekonsiliasi Sunni-Syi'ah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan tertutup untuk membahas penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang.</p> <p>e. Pada tanggal 20 Juni 2013²⁷⁸, Ulama dan ribuan santri mengadakan istighosah di Lapangan Wijaya Kusuma, meminta kepada pemerintah agar pengikut aliran Syi'ah keluar dari Sampang. Karena situasi yang memanas dan dikhawatirkan konflik kembali meletus, maka penganut aliran Syi'ah dipindahkan sementara menuju Rusun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo.</p>
2.	2014-2015	<p>a. Pemerintah Kabupaten Sampang, Ulama dan unsur keamanan melakukan pertemuan dengan wakil kedua belah pihak, yakni penganut aliran Sunni dan Syi'ah. Namun, forum pertemuan yang dilakukan tidak menemukan titik temu dan malah menambah buruk keadaan. Hal ini disebabkan adanya permintaan dari ulama, Bupati Sampang serta MUI Sampang yang meminta agar penganut aliran Syi'ah bertobat dan kembali ke ajaran Ahlussunnah baru mereka diperkenankan untuk kembali ke daerah masing-masing. Hal ini ditolak oleh penganut aliran Syi'ah yang tetap mempertahankan keyakinannya.²⁷⁹</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat setempat, Rektor</p>

²⁷⁸ Novy Lumanaw, "Presiden Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Persoalan Syiah," *beritasatu.com* (Sampang, Desember 2013), accessed December 29, 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/153592/presiden-gelar-pertemuan-tertutup-bahas-persoalan-syiah>.

²⁷⁹ Rachmah Ida and Laurentius Dysons, "Konflik Sunni-Syiah dan Dampaknya terhadap Komunikasi Intrareligius pada Komunitas di Sampang-Madura," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 28, No. 1 (March 2015): 47.

UIN Sunan Ampel Surabaya, Ketua Kanwil Kemenag Jatim dan menteri agama Republik pada tanggal 05 Agustus 2014 di SDN Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Dalam pertemuan ini terjadi dialog dan adanya aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh tokoh agama setempat bahwa kondisi di Desa sudah aman dan tentram. Jika penganut Syi'ah ingin kembali ke Sampang hendaknya melakukan pertaubatan kembali ke ajaran Sunni. Hal ini dikarenakan, jika penganut Syi'ah kembali ke Sampang sebelum melakukan pertobatan maka dikhawatirkan terjadi adu domba dan perselisihan. Selain itu, Karanggayam dan Blu'uran memiliki banyak ketertinggalan baik itu dari aspek pendidikan maupun ekonomi. Dampak dari ketertinggalan tersebut yakni mudahnya dipengaruhi pemikiran dan pengetahuan mereka.²⁸⁰

c. Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan pertemuan dengan penganut aliran Syi'ah, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Ketua Kanwil Kemenag Jatim dan menteri agama Republik Indonesia pada tanggal 05 Agustus 2014²⁸¹ di Rusun Jemundo, Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut terjadi dialog dan adanya aspirasi dari beberapa penganut Syi'ah. Mereka menginginkan dapat hidup damai berdampingan dan meminta pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka agar dapat hidup rukun walaupun memiliki perbedaan dan dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan apa yang dilindungi konstitusi. Selain itu, mereka juga menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Sampang tanpa

²⁸⁰ Kementerian Agama, "Ikhtiar Menag Mencari Solusi Konflik Sampang (Catatan Kunjungan Di Bumi Garam)," *Kementerian Agama Republik Indonesia* (Sampang, Agustus 2014), accessed December 30, 2021, <https://kemenag.go.id/read/ikhtiar-menag-mencari-solusi-konflik-sampang-catatan-kunjungan-di-bumi-garam-dy7ak>.

²⁸¹ Ibid.,

		<p>adanya syarat apapun.</p> <p>d. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Lakpesdam NU Sampang yang juga didampingi oleh Polres dan Kodim Sampang di Masjid Al-Ansar, Desa Blu'uran, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang mengadakan kegiatan Bina Inklusi pada hari Sabtu, 11 Juli 2015.²⁸² Dalam sesi wawancara ketua Laspekdam NU menyampaikan acara dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para warga untuk bersama-sama menjaga suasana yang sudah damai setelah meletusnya konflik tahun 2012. Situasi damai hendaknya dijadikan hikmah dalam menjalin kebersamaan. Disisi lain Kasdim Sampang juga menyampaikan hendaknya masyarakat segera melapor kepada aparat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri.</p> <p>e. Ulama Madura yang di antaraya Kyai Syafiuddin Wahid dan Kyai Ali Karra pada tanggal 06 Februari 2014 menyampaikan sebelum dilakukan pembangunan perumahan untuk penganut Syi'ah Sampang hendaknya dilakukan pembinaan di Pondok pesantren Assiddiqiyah.²⁸³</p>
3.	2016-2018	<p>a. Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dispenduk Capil Sampang memenuhi administrasi penduduk penganut aliran Syi'ah dengan mendatangi rusun. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu pemenuhan hak-hak warga negara dan menjadi rangkaian upaya rekonsiliasi sebelum berbicara mengenai keputungan.</p>

²⁸² Kompas Cyber Media, "Jangan Sampai Konflik Syiah-Sunni di Sampang Terulang," *KOMPAS.com*, July 11, 2015, accessed December 31, 2021, <https://regional.kompas.com/read/xml/2015/07/11/22425131/Jangan.Sampai.Konflik.Syiah-Sunni.di.Sampang.Terulang>.

²⁸³ Kantor Berita Radio, "Ini Dia Perjalanan Kasus Diskriminasi Syiah Sampang," *kbr.id*, accessed December 31, 2021, https://kbr.id/nasional/03-2014/ini_dia_perjalanan_kasus_diskriminasi_syiah_sampang/26533.html.

		<p>b. Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Polres Sampang melayani administrasi pembuatan SIM A, C, SKCK, STNK dan BPKB untuk memenuhi hak-hak warga negara sebagai salah satu rangkaian upaya rekonsiliasi.</p> <p>c. Kementerian agama Kabupaten Sampang bersama pengadilan agama Sampang dengan difasilitasi Tim KSP RI dan Kementerian Pusat menggelar Sidang Isbath dan menerbitkan buku nikah bagi warga pengungsi dan warga di lokasi konflik yang bertempat di Pendopo Kabupaten Sampang. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian rekonsiliasi untuk mendeteksi situasi, kondisi dan respons masyarakat ketika mengetahui ada penganut Syi'ah yang berada di Sampang.</p> <p>d. Pemerintah Kabupaten Sampang bekerjasama dengan Kemenag Kanwil Jawa Timur mengadakan kegiatan mengajar mengaji bagi anak-anak penganut Syi'ah dengan pengajar dari kalangan NU.</p> <p>e. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Komnas HAM dan kepala-kepala daerah melakukan pertemuan pada tanggal 29 November 2016²⁸⁴ mendiskusikan mengenai permasalahan pemulangan warga pengungsi yang masih mendapatkan penolakan dari beberapa tokoh agama di Kabupaten Sampang. Mereka masih beranggapan bahwa Syi'ah kurang benar dan meminta agar penganut aliran Syi'ah kembali ke ajaran Islam yang benar jika ingin pulang ke Sampang.</p> <p>f. Kominda Sampang bersama Bakesbangpol Sampang secara intens menggelar pertemuan dengan para tokoh Ulama dan intansi terkait untuk menyerap informasi serta pengkondisian situasi sehingga dapat</p>
--	--	---

²⁸⁴ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016).

		<p>dideteksi lebih cepat progress dan kisaran suara di lokasi konflik.</p> <p>g. Penganut aliran Syi'ah di rusun tidak diperkenankan untuk pulang ke kampung halaman, sehingga Pemerintah Kabupaten Sampang membuka halal bihalal di rusun dengan warga desa Blu'uran dan Karanggayam.²⁸⁵ Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi dan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertemukan kedua belah pihak. Halal bihalal dilakukan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Dari tahun ke tahun, warga desa yang mendatangi rusun semakin meningkat jumlahnya.</p> <p>h. Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan negosiasi dengan penganut Syi'ah pada tanggal 13 Juni 2018²⁸⁶ agar melakukan pemakaman warga pengungsi Sampang di TPU Delta, Praloyo, Sidoarjo dikarenakan saat itu terdapat penolakan dari warga setempat. Negosiasi ini dilakukan agar tidak terjadi bentrokan kembali antara penganut Sunni dan penganut Syi'ah.</p>
--	--	--

²⁸⁵ Eko Purwanto, *Wawancara*, Juni 2021.

²⁸⁶ Endri Kurniawati, "Jenazah Pengungsi Syiah dari Sampang Ditolak Penduduk Kampungnya," *Tempo*, June 14, 2018, sec. nasional, accessed January 9, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1098059/jenazah-pengungsi-syiah-dari-sampang-ditolak-penduduk-kampungnya>.

D. Tabel Analisis Dakwah Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Menyelesaikan Konflik Sunni-Syi'ah

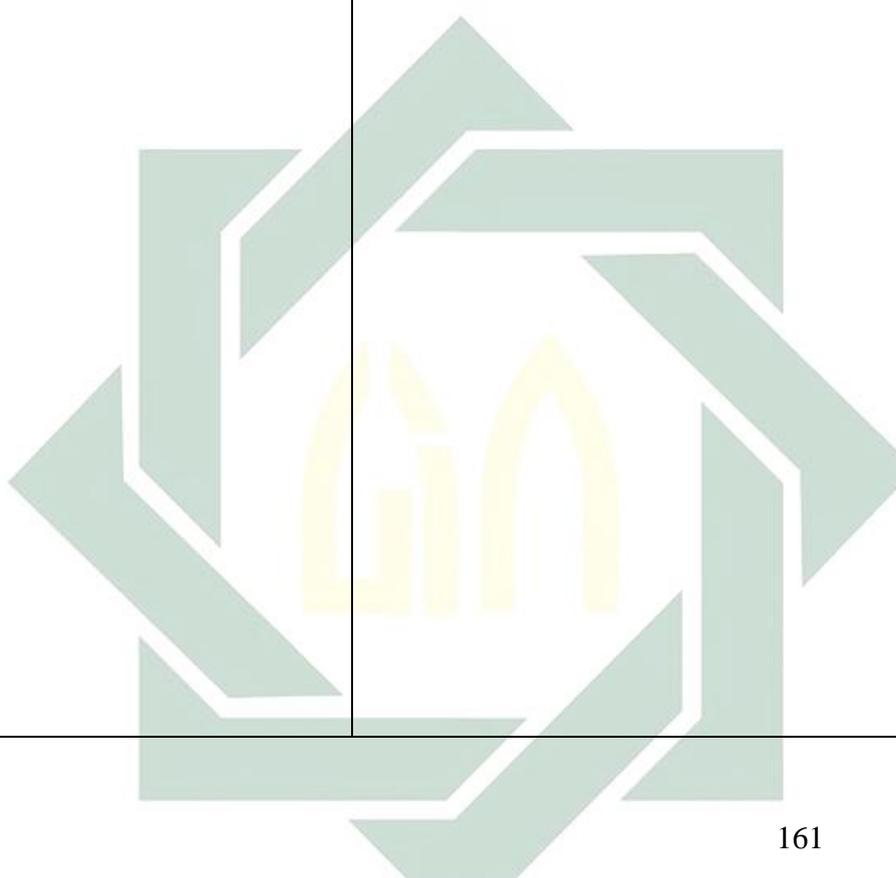
Tahap - Tahap	Langkah - Langkah	Analisis
Hubungan Antara Kedua Belah Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghentikan pengajian Mahtawiyah di rusun. 2. Pencabutan dan pemindahan santri dari lembaga Syi'ah ke lembaga Sunni. 3. Mengutus Ansor ke Jemundo untuk meninjau kondisi penganut Syi'ah. 4. Mengadakan baiat kembali ke Sunni. 5. Mengadakan pemantapan ajaran Ahlussunnah dengan kyai setempat di rusun. 	<p>Pemerintah Kabupaten Sampang memperbaiki hubungan keduanya dimulai dengan mendalami konflik dari perspektif keduanya. Konflik terjadi karena dakwah yang dilakukan oleh Pemimpin Syi'ah saat itu tidak menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada, sehingga mendapatkan pertentangan dari masyarakat setempat. Seperti halnya melarang orang melakukan maulid dan melarang untuk tunduk pada kyai dan gus. Selain itu, terdapat konflik keluarga antara ustad Tajul dan adiknya Rois yang meluas menjadi konflik umum. Masyarakat setempat akan menerima kembali jika penganut Syi'ah telah kembali ke ajaran Ahlussunnah. Permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh penganut Syi'ah. Untuk menengahi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan dakwah kepada keduanya sehingga dapat tercapainya <i>islah</i> atau perdamaian. Dakwah ini dilakukan dengan cara <i>hikmah</i> agar umat dapat menerima apa yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat An-Nahl ayat 125. Dakwah dapat lebih diterima oleh masyarakat jika disampaikan dari hati ke hati, tidak melalui kekerasan maupun paksaan serta</p>

		<p>disesuaikan dengan keadaan, kondisi dan tingkat pemahaman mad'unya.²⁹⁰</p> <p>Beberapa bentuk islah yang diambil yakni, pertama, menghentikan pengajian mahdawiyah di rusun. Menghentikan pengajian mahdawiyah ini ditempuh agar dapat menghilangkan pengaruh dari ajaran Syi'ah. Masyarakat setempat akan menerima jika penganut Syi'ah telah kembali ke ajaran Ahlussunnah. Kedua, Pencabutan dan pemindahan santri dari lembaga Syi'ah ke lembaga Sunni merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh penganut Sunni. Pencabutan dan pemindahan santri tersebut dilakukan karena Madura terkenal akan ke NU annya dalam rangka mengembalikan kepercayaan maka santri-santri diletakkan ke lembaga NU. Ketiga, mengutus Ansor ke Jemundo. Cara ini ditempuh sebagai salah satu cara untuk mempertemukan kedua belah pihak dan meyakinkan penganut Sunni akan kesungguhan penganut Syi'ah kembali ke ajaran Ahlussunnah. Pengutusan Ansor ke Jemundo untuk melihat secara langsung mengenai perubahan yang terjadi pada penganut Syi'ah. Penganut Syi'ah membaca syahadat diikuti dengan penyampaian keinginannya kembali ke ajaran Ahlussunnah di depan pemuda</p>
--	--	---

²⁹⁰ Toha Yahya Omar, *Islam & Dakwah*.

		<p>Ansor. Keempat, Mengadakan baiat kembali ke Sunni. Tujuan dari pengadaaan baiat ini untuk membuka ruang penerimaan penganut Sunni. Kehadiran penganut Syi'ah di Sampang tidak diterima oleh masyarakat dikarenakan memiliki akidah yang berbeda dengan faham Sunni. Selain itu, adanya pengusikan kearifan lokal yang dilakukan oleh penganut Syi'ah memicu kemarahan penganut Sunni. Dengan diadakannya baiat kembali ke Sunni sebagai pertanda untuk menciptakan hubungan yang baik di antara keduanya. Kelima, mengadakan pemantapan ajaran Ahlussunnah dengan kyai setempat di rusun. Dalam rangka menyelesaikan konflik pemerintah bekerjasama dengan kyai/ulama setempat mengadakan pemantapan ajaran Ahlussunnah untuk memulihkan kepercayaan warga setempat yang menganggap penganut eks. Syi'ah telah lemah pemahaman tentang Aswajanya. Pembinaan keagamaan dilakukan setiap bulan sekali dengan cara ulama/kyai setempat secara bergantian mendatangi rusunawa, Jemundo. Tujuan lain dari pembinaan ini agar dapat menjaga hubungan yang baik di antara keduanya.</p>
<p>Keterlibat Kelompok yang Berkonflik Bertemu</p>	<p>1. Melakukan musyawarah secara bergantian dengan penganut Syi'ah kemudian dilanjutkan dengan penganut Sunni.</p>	<p>Keterlibatan kelompok yang berkonflik bertemu tidak bisa sepenuhnya dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perspektif di antara kedua belah pihak. Penganut Sunni menjunjung</p>

	<p>2. Mempertemukan kedua belah pihak dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).</p> <p>3. Mempertemukan kedua belah pihak dalam acara buka bersama dengan Bupati.</p>	<p>tinggi kearifan budaya yang ada. Budaya dan agama memiliki perbedaan yang tipis sehingga siapapun yang ingin merubahnya tidak akan diterima oleh masyarakat setempat. Penganut Sunni menginginkan adanya baiat kembali ke ajaran Ahlussunnah yang dilakukan oleh penganut Syi'ah sedangkan penganut Syi'ah menolak hal tersebut. Sehingga dialog dengan mempertemukan keduanya tidak menemukan titik temu. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sampang merubah cara yang dilakukan dengan berperan sebagai penyambung lidah penganut Sunni dan penganut Syi'ah. Pemerintah melakukan musyawarah secara bergantian dari penganut Syi'ah kemudian dilanjutkan dengan penganut Sunni dan menyampaikan aspirasi kedua belah pihak. Selain secara bergantian menemui kedua belah pihak, Pemerintah mencari cara agar dapat mempertemukan kedua belah pihak melalui program tanah sistematis lengkap (PTSL). Kegiatan ini mengharuskan keduanya untuk bertemu dan melakukan pengukuran tanah langsung secara bersama-sama di lokasi. Dari program ini, pemerintah Kabupaten Sampang mengetahui tanggapan masyarakat setempat mengenai penganut Syi'ah. Warga masih tetap pada pendiriannya akan menerima kembali penganut Syi'ah jika telah kembali ke ajaran Ahlussunnah.</p>
--	---	--



		<p>Kembalinya penganut Syi'ah ini membuka ruang penerimaan masyarakat. Setelah pelaksanaan ikrar pemerintah kembali mempertemukan kedua belah pihak dalam acara buka bersama dengan Bupati Sampang. Sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya, pertemuan ini melibatkan kedua belah pihak untuk berinteraksi dan berdiskusi secara langsung. Pertemuan ini memunculkan kerangka acuan umum yang memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk mengakui masa lalu, mengakui kesalahan sebelumnya, menghidupkan kembali dalam kondisi aman, berduka atas kerugian, validasi rasa sakit yang dialami dan kesedihan, menerima empati dan dukungan, dan memulihkan hubungan yang rusak. Dengan adanya pertemuan langsung ini membuat mereka saling berkomunikasi dan berinteraksi yang nantinya akan muncul berbagai pengakuan kesalahan masa lalu, kesungguhan untuk kembali ke paham Ahlussunnah hingga memunculkan empati dan dukungan dari pihak lawan. Dari pertemuan langsung ini juga melahirkan berbagai kesepakatan-kesepakatan baru yang sebelumnya tidak direncanakan.</p> <p>Kesepakatan-kesepakatan tersebut meliputi, pertama diperkenankannya pemakaman warga pengungsi yang telah berbaiat. Kedua, keikutsertaan tim 5 dalam pembinaan keagamaan di</p>
--	--	--

		rusun. Ketiga, membantu pengurusan berkas-berkas pernikahan warga pengungsi di kampung halaman. Dari pertemuan tersebut menunjukkan kedua belah pihak sepakat telah sepakat untuk hidup berdamai dan berdampingan.
Inovasi Baru dalam Upaya Rekonsiliasi	Mencari kesepakatan bersama dengan kedua belah pihak.	Dakwah Rekonsiliasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dapat dibagi menjadi dua, yakni sebelum tahun 2016 dan sesudah tahun 2016. Sebelum tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sampang tidak memiliki perantara/fasilitator yang mendampingi penganut Syi'ah di rusun. Jika sekitar 2012-2016 penyelesaian konflik dilakukan secara bersama-sama dengan mempertemukan perwakilan kedua belah pihak. Pembahasan dalam pertemuan tersebut yakni mengenai siapa yang salah dan siapa yang benar, pulang dengan baiat dan pulang tanpa baiat, keduanya saling mempertahankan argumentnya masing-masing sehingga tidak dapat menemukan titik temu penyelesaian. Dikarenakan kedua belah pihak merasa benar dan menjadi korban. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah cara yang digunakan yakni dengan menunjuk perantara atau fasilitator yang diambil dari pihak kepolisian untuk mendampingi penganut Syi'ah di rusun. Kedua belah pihak diposisikan sama dan Pemerintah menyerap aspirasi dari kedua belah pihak. Pemerintah secara bergantian menemui

		<p>kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah, kemudian sebagai penyambung lidah menyampaikan aspirasi satu sama lain. Selain itu, Pemerintah sebagai mediator turut memberikan solusi penyelesaian konflik terbaik menjadi kesepakatan kedua belah pihak.</p> <p>Perubahan cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang terbukti membuahkan hasil perdamaian di antara keduanya, yakni, pertama dilaksanakannya baiat atau deklarasi ikrar kembali ke Ahlussunnah. Kedua, sudah diperkenankan pemakaman warga pengungsi Syi'ah yang telah menganut Ahlussunnah di kampung halaman bahkan yang memakamkan tim 5 yang selama ini menolak namun, menjadi tim paling depan untuk pemakaman. Ketiga, tidak dipermasalahkan kepulangan para warga untuk bersilaturrehmi ke kampung halaman. Keempat, kehadiran ulama di rusun untuk memberikan pembinaan keagamaan.</p>
--	--	---

- 7, 2021.
<https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/445>.
- Fariyah, Irzum. "Strategi Dakwah di Tengah Konflik Masyarakat." *Jurnal Addin IAIN Kudus* Vol. 8, No. 2 (2014). Accessed September 8, 2021.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/599>.
- Fatima, Siti. "Muhammadiyah-Syiah: Dinamika Pergulatan Muslim Hibrid Ditengah Dunia Global." *Jurnal Maarif* Vol.10, No.2 (Desember 2015): 161–174.
- Fidiyani. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)." *Jurnal Dinamika Hukum, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman* Vol 13, No 3 (2013). Accessed September 8, 2021.
<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/256>.
- Gatra, Sandro. "Pemerintah Bentuk Tim Rekonsiliasi Sampang," 2013. Accessed April 8, 2021.
<https://nasional.kompas.com/read/2013/07/15/2312479/Pemerintah.Bentuk.Tim.Rekonsiliasi.Sampang>.
- HAM, Komnas. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.
- Handayani, Rossi. "Satu Golongan Umat Nabi Muhammad yang Selamat." *Republika Online*, March 30, 2021. Accessed May 8, 2021.
<https://republika.co.id/share/qqr7x4430>.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan : Wal Ashri Publishing, 2020. Accessed November 7, 2021. <https://id1lib.org/book/11700142/76e0b9>.
- Hasan, Mohammad. *Metodologi & Pengembangan Ilmu Dakwah*. Surabaya : Pena Salsabila, 2013. Accessed August 9, 2021.
<https://id1lib.org/book/6144861/96b452>.
- Hasyim asy'ari, Muhammad. *Risalah Aswaja Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah dari Pemikiran, Doktrin, hingga Model Ideal Gerakan Keagamaan*. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media, 2015.
- Ida, Rachmah, and Laurentius Dysons. "Konflik Sunni-Syiah dan Dampaknya terhadap Komunikasi Intrareligius pada Komunitas di Sampang-Madura." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 28, No. 1 (March 2015): 33–49.
- Iskandar. *Dakwah Inklusif: Konseptualisasi dan Aplikasi*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

